PENTINGNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR KEHIDUPAN BERSAMA DI INDONESIA

SINTIA RADISKA

SHINTIARADISKA19@gmail.com

20220078

AKBP - STIE "KBP" PADANG

A.PENDAHULUAN

Suatu negara diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan pasti memiliki sebuah dasar/ fondasi dimana dasar tersebut merupakan bagian utama sebuah bangunan itu berdiri kokoh. Jika sebuah bangunan tidak memiliki dasar / fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan mudah rusak dan roboh. Namun, jika fondasi dari bangunan tersebut kuat, maka bangunan itu tidak akan mudah roboh. Sama seperti negara, setiap negara pasti memiliki sebuah fondasi. Fondasi/ dasar dari sebuah negara itu yang mempengaruhi negara tersebut dapat berdiri kokoh/ tidak. Negara yang memiliki dasar yang kokoh akan menjadikan negara tersebut tetap maju dan berdiri tegak. Begitu pula sebaliknya, negara yang memiliki dasar yang lemah akan menjadikan negara itu mudah roboh dan runtuh.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri kokoh karena Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Selama hampir 75 tahun Indonesia berdiri, banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun, dengan adanya tantangan dan rintangan tersebut tidak menghancurkan Indonesia, tetapi membuat Indonesia semakin kuat dan erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki dasar yang kuat, dasar itulah yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta, yakni *Panca* dan *Sila*. *Panca* berarti lima, dan *Sila* berarti asas. Pancasila berarti sebuah rumusan berisi 5 asas yang digunakan oleh Bangsa Indonesia untuk pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B.PEMBAHASAN

1. Nilai Dasar

Nilai Dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu / tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yang kemudian bisa dijabarkan menjadi Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis. Contoh dari Nilai Dasar ini adalah:

- Ketuhanan
- Kemanusiaan
- Persatuan
- Musyawarah
- Keadilan

2. Nilai Instrumental

Nilai Instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai Instrumental ini merupakan jabaran dari Nilai Dasar dalam bentuk UUD 1945 dan Tata Urutan Perundang -

Undang-Undang Negara menurut UU No. 10 Tahun 2004

3. Nilai Praksis

Nilai Praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental. Nilai Praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, namun karena penjabaran dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental, maka sifatnya Nilai Praksis ini perwujudannya tidak boleh menimpang. Misalnya pada sila ke-3, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Banyak dari kita yang mengerti arti dari Pancasila, bahkan mengerti arti dari nilai-nilai didalamnya. Namun sekedar mengerti, tidak berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila tersebut, dan tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga harus mengerti makna nilai dari setiap sila yang ada. Makna nilai-nilai dari sila Pancasila ialah :

1. Ketuhanan

Di Indonesia, semua Warga Negara Indonesia berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, serta hubungan negara dengan agama. Oleh karena itu, tidak boleh ada larangan orang beragama.

3. Persatuan

Bangsa Indonesia itu ada karena adanya semangat ingin Bersatu. Semangat ingin Bersatu itulah yang menjadikan Indonesia memiliki kesatuan yang utuh, serta banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia ini menjadikan negara kita memiliki persatuan dan kesatuan.

4. Musyawarah

Dalam kita mengambil sebuah keputusan, untuk mencapai sebuah mufakat, kita membutuhkan proses yang dinamakan dengan musyawarah. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk mencari jalan keluar dari sebuah keputusan. Dalam bermusyawarah, sangat penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar saat mencapai mufakat tidak terjadi pertikaian. Oleh karena itu, diperlukan dialog diantaranya. Dialog diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan kita dengan orang lain.

5. Keadilan

Keadilan berarti memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan haknya, bukan hanya orang lain saja, bahkan sekelompok orang juga bisa. Dalam sila Pancasila yang kelima, Negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.

Dengan begitu seharusnya makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu harus kita dalam, kita lakukan dan kita cintai. Sebagaimana kita menganggap diri kita itu penting, Pancasila juga sangat penting sebagai dasar kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila ini menjadi dasar bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya, karena kita hidup tidak mungkin sendiri, kita membutuhkan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia memiliki banyak macam suku bangsa, ras, budaya, dan lainnya. Indonesia terdiri dari 17.000 ribu pulau, 1340 suku bangsa, 6 agama, 1 kepercayaan, serta banyak budaya. Sangat memungkinkan untuk membuat Indonesia terpecah, maka dari itu dibutuhkan suatu alat yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia, yang bisa mengikat keberagaman tersebut, yaitu Pancasila. Selain Pancasila, perlu kesadaran diri setiap individu untuk memiliki rasa ingin Bersatu. Jika setiap individu sadar akan pentingnya memiliki pemikiran yang sama, perilaku yang sama, maka hal itulah yang bisa membuat kita menjadi satu kesatuan yang utuh.

C.DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah PerbatasanIndonesia*, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang* Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki PeraturanPerundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja,

Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal-Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbang Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.